

Reformasi Politik di Indonesia, UUD 1945 Pascaamandemen dan Studi HTN

**Presentasi Oleh:
Mohammad Fajrul Falaakh
Pada Lokakarya *Niche* FH UGM
Yogyakarta, 6-Februari-2008**

Dosen Aktif pada Bag. HTN FH UGM

- Mohammad Fajrul Falaakh, SH. MA. MSc. (Ketua): UGM, Uni. Of London.
- Andy Omara, SH. M.Pub.Int. Law (Sekretaris): UGM, Uni. Melbourne.
- Sardjuki, SH. MH: UGM, Unpad.
- Joko Setiono, SH. MH: UGM, Unpad.
- Enny Nurbaningsih, SH. MH: UGM, Unpad.
- Aminoto, SH. MSi: FH UGM, Fisipol UGM.
- Denny Indrayana, SH. LLM. PhD: UGM, Uni. Wisconsin, Uni. Melbourne.
- Andi Sandi ATT, SH. LLM: UGM, Uni. Washington.
- Dibantu oleh Jaka Triyana, Eddy Hiariej, Rafael E. Bosko untuk Hukum dan HAM.

Komentar tentang *Niche*

- *Niche: position, role, function in the senses of specialization, rigor and uniqueness*, keandalan pada bidang (keilmuan, praktik) yang ditekuni.
- Jadi, *niche* teoritik (*niche* pendidikan tinggi, riset), praktik (*niche* pada *law firms*), atau keduanya?
- Pilihan: untuk mengembangkan kekuatan diri (rekayasa; menurut *Higher Education Long-Term Strategy*)? Atau hanya berdasar identifikasi kekuatan yang ada?
- Rekayasa *niche*: partisipatorik atau birokratik? Menurut kriteria apa?
- Identifikasi *niche*: ukuran & caranya? SWOT? Apa lagi?

Komentar tentang *Niche*

- Kriteria kekuatan (teoritik & praktik) atau daya tarik FH UGM: *Webbo Rank*, *Top-100 World Universities* (UK)? *Asia University Network*? BAN (Akreditasi Depdiknas)? Rasio jumlah peminat (Calon mahasiswa)? Pengguna lulusan (data *tracer*?).
- *Niche* FH-UGM dinilai, ditentukan, dikembangkan dalam populasi apa: FH se-DIY, se-Jateng, antar-FH negeri, se-Indonesia, se-ASEAN, se-Asia?
- Data Depdiknas 2007: 64 perguruan tinggi menutup 113 program studi, tetapi 167 PT membuka 761 prodi (*Kompas*, 14/2/2008). Apa yang terjadi pada “contoh *niche*” PT ini?

Relevansi Studi HTN (Perspektif Keilmuan)

- Salah satu pokok bahasan ilmu hukum.
- Tentang negara RI.
- *Constitution as legal order.*
- *HTN wird nicht gemacht; est is und wird mit dem volkes.*
- UUD berubah: Pelajari Sistem dan Tertib hukum berubah.

Relevansi Studi HTN

(Perspektif empirik)

- Amandemen aturan dasar bernegara: MPR bukan lembaga tertinggi, pemisahan kekuasaan, *checks and balances*, semakin presidentil, bikameral, penambahan lembaga negara/konstitusi, hub. Pusat-Daerah divergen-asimetrik, *dual structure of judiciary*, *financial audit sld APBD*, 20% anggaran pendidikan, ekstensifikasi jaminan HAM, dll.
- *Rules of applicability*: peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD; ada HAM *non-derogable* dan ada yang dapat dikurangi melalui UU; berbagai hal harus diatur UU (mis. pajak, APBN, penggunaan SDA); UU dihasilkan dari persetujuan DPR-Presiden, dsb.
- *Rules of reference*: MK menguji UU terhadap UUD (24C(1)); MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU (24A(1)).

Cakupan Studi HTN

(Muatan Konstitusi Pascaamandemen)

- Ciri-ciri negara: kedaulatan rakyat, bentuk negara dan sistem pemerintahan, negara hukum, negara kesejahteraan;
- Organisasi negara & kekuasaan konstitusional;
- Pemisahaan kekuasaan & hubungan antarlembaga (*checks & balances*);
- Warganegara & HAM;
- Wilayah negara;
- Kualitas hidup bangsa: ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, *good governance*, ...?
- Prosedur dan syarat perubahan konstitusi.

No	Mata kuliah Smt. I	SKS	Mata kuliah Smt. II	SKS
1	Ilmu Negara	3	Hukum Tata Negara	4
2	Hk. Keneg. & Per-UU-an	4	Hukum dan HAM	2
3	Legal Drafting	2	Judicial Review	2
4	Hukum Konstitusi	2	Hukum Konstitusi	2
5	Hk. Kelembagaan Negara	2	Hk. Kelembagaan Negara	2
6	Negara Hukum	2	Negara Hukum	2
7	Perbandingan HTN	2	Perbandingan HTN	2
8	Hk. Pem. Daerah	2	Hk. Pem. Daerah	2
9	Proses Perancangan Per-UU-an	2	Proses Perancangan Per-UU-an	2
10	Hukum dan Politik	2	Hukum dan Politik	2
11	Pemilu dan Kepartaian	2	Pemilu dan Kepartaian	2
12	Hub. Legislatif-Eksekutif	2	Hub. Legislatif-Eksekutif	2
13	Lembaga Kepresidenan	2	Lembaga Kepresidenan	2
14	Kekuasaan Kehakiman	2	Kekuasaan Kehakiman	2
	Mohammad Fairul Falaakh			8
		31		30

Mata kuliah dikelola Bag. HTN

- Mk wajib bagi seluruh mahasiswa: Ilmu Negara, HTN, HKPU, Hukum & HAM.
- PLKH (6-sks): Bag. HTN menawarkan *Legal Drafting* (Smt. I), *Judicial Review* (Smt. II).
- Konsentrasi: 11 Mk (22 sks) tiap Semester. Mahasiswa dapat mengambil dari Bagian lain 2-Mk (4-sks) yang relevan dengan penulisan Skripsi.

Kekuatan & Kemauan Bag. HTN

- Kekuatan Teoritik: Teori, perspektif maupun pokok bahasan baru ketatanegaraan pascaamandemen (*new constitutional theories, perspectives and issues*) → Siapa menilai?
- Kekuatan empirik/praktik: *Legal Drafting, Judicial Review, Constitutional drafting and amendment, Constitutional Adjudication*) → Siapa kompetitor?
- Kemauan baru (PLKH/Konsentrasi): Penyelesaian Sengketa Lembaga Negara (*Intergovernmental disputes settlement*), Desain dan Praktik Pemilu (*Electoral laws: Design and Practice*), Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu (*Electoral disputes settlement*) → Siapa memutuskan?
- Karena itu perlu tambah dosen HTN, selain karena perekrutan terakhir 7 tahun yll (dari 8 dosen aktif).

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 1003 Ilmu Negara: negara dalam pengertian abstrak, asal-mula, hakikat, tujuan, kekuasaan, bentuk negara, sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, hubungan antarnegara.
- HKU 1004 HTN: negara dalam pengertian konkrit (Indonesia) sesuai dengan hukum konstitusi. Untuk itu, dibicarakan tentang sejarah konstitusi di Indonesia, sumber-sumber HTN, pemisahan dan organisasi kekuasaan negara, hub. pusat-daerah, warga negara dan hak-hak asasi manusia.
- HKU 2017 HKPU: hubungan antarlembaga negara (*checks and balances*), negara hukum dan prinsip supremasi konstitusi, hubungan lembaga perwakilan rakyat dan eksekutif, proses legislasi, hubungan pusat-daerah.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 3036 Hukum dan HAM: pengertian HAM, teori-teori HAM, sejarah instrumen dan mekanisme penegakan HAM (domestik dan internasional), *transitional justice*, peradilan HAM (reguler dan *adhoc*) di Indonesia, hubungan antara HAM dan kekuasaan negara.
- HKU 3051 PLKH *Legal Drafting*: bentuk dan isi rancangan perundang-undangan, seni merancang. Penekanan pada segi praktis melalui pelatihan.
- HKU 3052 PLKH *Judicial Review*: wewenang MK dan MA dalam menguji peraturan perundang-undangan, perkembangan JR, hirarki perundang-undangan, jenis-jenis atau model JR, hubungan antara JR oleh MA dan MK, proses dan hukum acara JR, akibat hukum JR, implikasi sosial-politik, JR dan demokrasi.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 4001 H. Konstitusi: pengertian konstitusi, teori-teori konstitusi, serta struktur dan materi muatannya. Pembicaraan dipusatkan pada hukum konstitusi hasil amandemen dan isu-isu mutakhir.
- HKU 4002 H. Kelembagaan Negara: lembaga negara menurut UUD yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, terutama mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan wewenang, hubungan tata-kerja antar lembaga negara (*checks and balances*) dan pertanggungjawabannya.
- HKU 4003 Negara Hukum: konsep dan tipologi negara hukum, pertumbuhannya di Eropa kontinental (*rechtsstaat*) dan tradisi Anglo-Sakson (*rule of law*) dan perkembangannya di Indonesia.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 4004 Perbandingan HTN: membandingkan berbagai pokok bahasan seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, yudikatif, legislatif, eksekutif, peradilan konstitusi dengan sistem ketatanegaraan dan konstitusi negara-negara lain.
- HKU 4005 H. Pemerintahan Daerah: perkembangan sejak masa Hindia Belanda hingga saat ini, asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, teori dan prinsip otonomi daerah, struktur organisasi pemerintah di daerah.
- HKU 4006 H. Kewarganegaraan: asas dan *stel/sel* dalam memperoleh kewarganegaraan, hak opsi, hak repudiasi, cara memperoleh dan cara kehilangan kewarganegaraan, penduduk negara, SBKRI.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 4008 (Proses) Perancangan Perundang-undangan: konteks makro dan proses penyusunannya di tingkat pusat maupun daerah. Dibahas pula peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses legislasi serta hirarki, pengujian, bentuk dan isi peraturan perundang-undangan.
- HKU 4009 Hukum dan Politik: hubungan hukum dan politik, pengaruh sistem politik terhadap hukum (perundang-undangan maupun peradilan). Pembahasan diletakkan dalam konteks kebijakan pembangunan hukum nasional.
- HKU 4010 H. Pemilu dan Kepartaian: pengertian dan arti penting partai politik dalam kehidupan kenegaraan, perkembangan kepartaian, asas dan sistem pemilihan umum di Indonesia.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 4011 Hub. Legislatif dan Eksekutif: hub. antar-lembaga eksekutif dan legislatif menurut teori-teori yang ada, kemudian menyoroti hukum positif yang berlaku di Indonesia serta praktiknya dalam berbagai bidang (legislasi, kontrol pemerintahan, anggaran, dan lain-lain). Dibahas pula anomali, distorsi dan inkonsistensi hubungan keduanya.
- HKU 4012 Lembaga Kepresidenan: presiden menurut UUD 1945 pascaamandemen, kekuasaan dan kewenangan presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan) dalam berbagai bidang, pemilihan dan pemberhentian presiden, hubungan presiden dengan lembaga-lembaga konstitusional (*constitutional bodies*), kabinet dan kementerian negara, sekretariat negara.

Silabi pada Bag. HTN FH UGM

- HKU 4013 Kekuasaan Kehakiman: perkembangan kekuasaan kehakiman (*judicial powers*) di Indonesia (penekanan pada UUD 1945 pascaamandemen), yurisdiksi dan struktur organisasinya, prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, lembaga-lembaga pengawas penegakan hukum, peradilan konstitusi, serta hubungan lembaga-lembaga peradilan dengan politik.
- HKU 4014 Hukum Penegakan HAM: pemajuan HAM, model dan mekanisme *transitional justice*, prosedur dan mekanisme penegakan HAM oleh peradilan, KKR, KKP RI-Timor Leste, penanganan kasus-kasus HAM berat.